

BAB III

RESOLUSI KONFLIK SUMBER AIR SUNGAI YORDAN SERTA PROFIL *ECOPEACE MIDDLE EAST* SEBAGAI NGO

Berbagai pengaturan konflik yang telah diatur dalam rangka pembagian sama rata atas alokasi Sungai Yordan belum cukup mampu membawa perdamaian bagi negara daerah aliran Sungai Yordan. Tidak adanya kata kesepakatan terhadap jumlah alokasi air Sungai Yordan yang kemudian membuat konflik semakin berkepanjangan. Akibat dari konflik tersebut yang kemudian memunculkan perang, salah satunya yakni pecahnya *Six Day War* yang salah satu motifnya adalah perebutan sumber Air Sungai Yordan. Keadaan diantara negara-negara daerah aliran Sungai Yordan yang tak kunjung mereda setelah perang, hingga pada akhirnya Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi konflik yang menjadi solusi atas permasalahan perebutan sumber daya air Sungai Yordan yang melibatkan Israel, Yordania dan Palestina.

Terlepas dari itu, berbagai pengaturan internasional yang tak membuahkan hasil atas konflik daerah aliran Sungai Yordan, hingga pecahnya *Six Day War* pada saat itu dan munculnya resolusi konflik oleh Dewan Keamanan PBB, secara tak langsung membuktikan bahwasanya berbagai pengaturan internasional belum mampu meminimalisir konflik sumber air Sungai Yordan. Hingga pada akhirnya, munculah *EcoPeace Middle East* sebagai organisasi non-profit hadir untuk berperan dalam meminimalisir konflik Sungai Yordan yang terjadi antara Israel, Yordania dan Palestina dengan pendekatan advokasi.

3.1 Resolusi PBB Nomor 242 Setelah Berakhirnya *Six Day War*

Resolusi konflik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencari solusi damai dalam mencari jalan keluar atas suatu perilaku konfliktual. Resolusi konflik dapat berupa pembuatan keputusan. Dalam hal ini, konflik perebutan sumber air Sungai Yordan yang berujung pecahnya Perang Enam Hari, telah menghasilkan suatu resolusi konflik sebagai upaya negosiasi perdamaian atas perselisihan yang terjadi antara Arab-Israel. Dalam resolusi konflik ini memfokuskan pada penyelesaian masalah yang terjadi di Timur Tengah dengan prinsip "*Land For Peace*".

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Nomor 242 tanggal 22 November tahun 1967 dimana resolusi ini sebagai latar belakang dari berakhirnya *six day war* atau perang enam hari pada tahun 1967. Pada saat Perang Enam Hari merupakan keadaan dimana Israel menyatakan perang terhadap negara Arab yakni sebagai bentuk respon terhadap ancaman dari Presiden Nasser yang merupakan Presiden Mesir. Setelah melalui rangkaian perang, dalam kurun enam hari Israel telah berhasil merebut Tepi Barat dari Yordania, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah (Ertz, 2009). Meskipun Sinai telah kembali ke tangan Mesir, tetapi pada saat itu Tepi Barat, Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan masih diduduki Israel. Semua wilayah Palestina yang memiliki aspek historis telah berhasil dikuasai oleh Israel, serta Israel juga turut mendirikan pemerintahan militer baru.

Berikut adalah resolusi konflik yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB Nomor 242 (*UN Resolution 242*) (ProCon, 2012)

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East, Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area; (b) For achieving a just settlement of the refugee problem; (c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible

Resolusi 242 adalah salah satu resolusi yang banyak memuat resolusi tentang konflik Arab-Israel dimana dengan membentuk dasar untuk negosiasi antara Arab dan Israel. Ini yang kemudian menyebabkan terciptanya beberapa perjanjian perdamaian antara Israel dan Mesir tahun 1979, Israel dan Yordania

tahun 1994, serta perjanjian antara Israel dan Palestina tahun 1993 dan 1995. Resolusi 242 menekankan pada pentingnya kedaulatan kemerdekaan politik dan integritas teritorial bagi setiap negara bagian dalam wilayah tersebut. Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 disponsori oleh duta besar Inggris Lord Caradon. Resolusi 242 memuat beberapa hal penting seperti menuntut rezim Zionis Israel untuk segera (IRAN(Indonesian Radio), 2015) :

- a. Menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam perang Arab-Israel Juni 1967
- b. Menghentikan segala bentuk operasi militer
- c. Mengakui kedaulatan negara-negara di kawasan
- d. Menjamin keselamatan kapal-kapal yang melintas di perairan internasional di kawasan seperti Teluk Aqaba dan Terusan Suez
- e. Mencari penyelesaian masalah pengungsi Palestina secara adil

Resolusi 242 yang dikeluarkan oleh PBB juga menyerukan tentang konsep “*Land For Peace*”. Dalam konsep tersebut, PBB menyerukan untuk penarikan mundur tentara Israel dari wilayah yang telah diduduki Israel pada tahun 1967 agar terealisasi perdamaian antar tetangga yakni negara-negara yang berbatasan secara langsung dengan Israel. Resolusi ini merupakan awal penting kemajuan yang berkaitan dengan pengaturan perdamaian pada saat itu. Realita yang terjadi pada saat itu bahwasanya tidak ada perjanjian damai antara setiap negara Arab dan Israel hingga sampai saat muncul [*Israel-Egypt Peace Treaty*](#) tahun 1979. “*Land For Peace*” menjadi dasar atas Perjanjian Damai Israel-Mesir, dimana Israel menarik diri dari Semenanjung Sinai. Kemudian Mesir menarik klaimnya

ke Jalur Gaza dalam mendukung [Palestine Liberation Organization](#). Kemudian yang dilakukan Yordania juga meninggalkan klaim mengenai Tepi Barat dan mendukung [Palestine Liberation Organization](#), selain itu Yordania telah menandatangani Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania pada tahun 1994, yang mengesahkan sungai Yordan sebagai batas dari Yordania.

Konsep *Land For Peace* yang diajukan oleh PBB menawarkan kesepakatan yang menjanjikan, hingga kemudian berawal dari *Land For Peace* tersebut kemudian berhasil mewujudkan perjanjian antara Israel dan Arab (Mesir) yakni perjanjian *Camp David* di tahun 1978. Perjanjian tersebut merupakan salah satu yang menjadi awal perjanjian antara Arab-Israel hingga muncul perjanjian-perjanjian lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari diselenggarakannya Konferensi Madrid tahun 1991, Oslo Accords, dan pertemuan diantara para pemimpin Amerika Serikat, Israel dan PLO di Camp David II tahun 2000 (Wolf A. T., 1993).

Dalam perkembangan berbagai perjanjian yang diselenggarakan antara Arab-Israel tak sepenuhnya membawa perdamaian diantara Arab-Israel. Berbagai perjanjian yang seharusnya menjadi upaya perdamaian dikeduabelah pihak belum mampu memberikan hasil nyata. Hal ini pada dasarnya dikarenakan oleh keduabelah pihak yakni Arab-Israel masih enggan untuk mencapai kesepakatan damai. Hal mendasar yang melatarbelakangi mengapa Arab dan Israel menolak solusi perdamaian salah satunya disebabkan oleh perbedaan pandangan keduabelah pihak yang dipengaruhi oleh sejarah dan keyakinan. Dimana sejarah mengenai awal terbentuknya gerakan Zionis yang dianggap sebagai awal mula

ancaman dan perbedaan keyakinan yang mendasari Arab-Israel yakni Islam dan Yahudi sehingga keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Dalam realitanya, pelaksanaan Resolusi PBB Nomor 242 masih banyak hambatan dalam pencapaian kesepakatan bersama.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Resolusi PBB Nomor 242

Dalam menerapkan resolusi perdamaian antara Arab-Israel, untuk mencapai tujuan bersama, PBB banyak melalui dinamika dalam implementasinya. Dikeluarkannya Resolusi 242 merupakan suatu prestasi dalam proses diplomasi menangani konflik Arab-Israel. Resolusi itu menekankan bahwa tidak seharusnya perang digunakan untuk perebutan wilayah. Resolusi itu menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembicaraan-pembicaraan damai antara Israel dan negara-negara Arab. Namun dalam pelaksanaannya, resolusi yang telah diatur sedemikian rupa untuk mencapai kepentingan bersama tanpa merugikan masing-masing pihak, realitanya resolusi tersebut masih mengalami beberapa hambatan. Sulitnya mengatasi sensitivitas yang melibatkan Arab-Israel membuat resolusi perdamaian tidak semata-mata dapat berjalan sesuai hakekatnya. Berikut beberapa faktor penghambat dalam penerapan kebijakanyang dikeluarkan PBB (Islamiyah, 2016):

a. Tidak Dipatuhinya Kebijakan-kebijakan PBB Oleh Pihak Yang Terlibat Konflik

Isu-isu yang melibatkan konflik Arab-Israel seperti pengungsi, pasokan air dan masalah keamanan dimana Palestina meyakini bahwa mereka yang sesungguhnya pemilik tanah yang dipersengketakan sehingga batas wilayah yang

disetujui harus berdasarkan pada Resolusi PBB nomor 242 yaitu batas wilayah sebelum Israel mengambil alih Gaza, Tepi Barat, Sinai dan Yerussalem. Disatu sisi, Zionis Israel meyakini bahwa tanah yang mereka tempati yakni wilayah Gaza dan Tepi Barat merupakan “Tanah Yang Dijanjikan” bagi pemeluk Yahudi dan telah menjadi hak para Yahudi sebagaimana yang telah Tuhan mereka katakan dalam kitab suci Yahudi. Hal ini kemudian menyebabkan Israel tidak mau untuk menyerahkan tanah yang sudah mereka duduki dengan membangun industri atau tempat tinggal sebab merupakan bagian dari menggunakan hak mereka.

Upaya PBB yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui Resolusi 242 dalam usaha perdamaian konflik Arab-Israel belum mampu menunjukkan hasil signifikan karena masih banyak pelanggaran dan tidak dipatuhinya kebijakan yang telah dikeluarkan PBB oleh salah satu pihak yang terlibat. Hal tersebut juga diperkuat dengan dibuktikan dengan ditolaknya konsep “*Land For Peace*” yang tertuang dalam resolusi DK PBB Nomor 242 karena Palestina menganggap bahwa konsep tersebut dirasa merugikan pihak Palestina dimana jalur Gaza dan Tepi Barat menjadi teritori Israel.

Dalam konsep “*Land For Peace*” Israel menawarkan perdamaian bagi negara-negara Arab. Namun, sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara Arab adalah menolaknya. Negara-negara Arab tersebut menginginkan perdamaian dalam artian *non eksistensi* dari negara Israel di wilayah tersebut. Jadi, yang dimaksud negara-negara Arab ialah bukan hanya sekedar damai dalam konteks dimana janji Israel tidak menyerang negara-negara Arab secara militer maupun hak atas wilayah tersebut (Islamiyah, 2016).

b. Faktor Internal

Faktor internal menjadi salah satu hambatan bagi implementasi kebijakan oleh PBB. Salah satunya adalah masih adanya konflik internal yang terjadi di Palestina. Penolakan paling konsisten dari Resolusi 242 berasal dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) , yang dari awal tahun 1964 menolak penyelesaian damai dengan Israel (Oren, 2009). Sebuah kelompok baru yang disebut Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah dibuat dengan misi tunggal membebaskan Palestina. Setelah tahun 1974, namun, seperti PLO bergerak menuju gagasan penyelesaian negosiasi dengan Israel, semakin berdasarkan keberatan untuk Resolusi 242 pada kenyataan bahwa itu ditangani dengan Palestina sebagai pengungsi, bukan sebagai orang dengan hak-hak nasional.

PLO yang pada awalnya diakui sebagai pemegang kekuasaan di Palestina ditentang oleh Hamas karena memiliki perbedaan pandangan dengan PLO. Sehingga yang terjadi adalah faksi-faksi tersebut kerap terlibat konflik dengan Israel. Pada perkembangannya Hamas menjadi pemegang kekuasaan di Palestina. Tujuan dari Hamas yang beraliran radikal adalah untuk menghancurkan Israel yang secara terang-terangan tertuang dalam piagam Hamas. Piagam ini juga menyerukan atas penguasaan kembali seluruh wilayah Israel dan Palestina dan ingin mendirikan negara Palestina merdeka serta menghapus negara Israel.

c. Faktor Eksternal

Faktor terakhir yang menjadi hambatan adalah ketika adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam hal kebijakan PBB. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tidak dapat dipungkiri keterlibatan dan intervensinya terhadap

permasalahan-permasalahan dunia dapat membawa dampak tersendiri. Salah satu contohnya adalah bagaimana sikap Amerika Serikat dalam menggagalkan veto atas pemukiman rakyat Palestina. Hal tersebut menggambarkan bagaimana komitmen Amerika Serikat dalam menjaga hubungan bilateral dengan Israel dan menjadikan Israel sebagai sekutu dekat yang akan selalu diberi dukungan dan dilindungi oleh Amerika Serikat dalam usaha mempertahankan kedaulatannya di tanah Palestina. Amerika Serikat cenderung mendukung Israel walaupun seringkali Israel terlibat dalam konflik yang merugikan banyak pihak. Intervensi oleh Amerika Serikat tanpa disadari dapat menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel bahkan Arab-Israel.

Hubungan diplomatik yang erat antara Amerika Serikat dan Israel telah membawa pada ranah intervensi terhadap konflik yang melibatkan negara Israel. Mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat ke 37 yakni Richard Nixon (1969-1974) pada pidatonya di Organisasi Zionis Dunia (Bard, 2000):

"The United States stands by its friends. Israel is one of its friends. Peace can be based only on agreement between the parties and agreement can be achieved only through negotiations between them. The United States will not impose the terms of peace. The United States is prepared to supply military equipment necessary to support the efforts of friendly governments, like Israel's, to defend the safety of their people."

Dalam pidatonya, Richard Nixon menjelaskan bagaimana kuatnya hubungan Israel sebagai sahabat Amerika Serikat. Poin penting dari petikan pidatonya adalah tentang sikap Amerika Serikat dimana Amerika Serikat siap membantu Israel dengan memasok peralatan militer yang diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah Israel, untuk mempertahankan keselamatan orang-orang Israel. Keberpihakan itulah yang dapat menjadi kegagalan dalam negosiasi

damai Arab-Israel. Keterlibatan Amerika Serikat terhadap konflik Arab-Israel menjadi penting kaitanya diperhatikan karena melihat fakta-fakta yang ada tentang kuatnya hubungan Amerika Serikat-Israel, sehingga memunculkan indikasi Amerika Serikat hanya melakukan pembelaan dan dukungan terhadap Israel. Hal tersebut yang kemudian menjadikan salah satu alasan sulitnya mewujudkan perdamaian Arab-Israel jika terus mendapat tekanan dan intervensi Amerika Serikat.

Selain beberapa faktor penghambat yang telah disebutkan diatas, hal lain yang meembuat Resolusi PBB Nomor 242 tentang kebijakan terhadap masalah sumber air Sungai Yordan tidak diatur secara rinci. Draft resolusi 242 hanya berisikan tentang pengaturan pengakuan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik, termasuk masalah pengungsi Palestina. Belum ada resolusi sebagai jalan keluar atas permasalahan konflik sumber daya air Sungai Yordan. Padahal Perang Enam Hari yang melibatkan Arab-Israel adalah salah satu motifnya tentang perebutan sumber air Sungai Yordan. Hal ini yang kemudian membawa pada kebijakan Resolusi 242 belum mampu mengatasi masalah konflik sumber air Sungai Yordan yang melibatkan Israel, Palestina dan Yordania.

3.3 *EcoPeace Middle East* Sebagai Penggerak Inisiatif Perdamaian

Sikap yang ditunjukkan PBB dengan pengeluaran resolusi perdamaian Nomor 242 Tahun 1967 sebagai tindakan lebih lanjut akibat dari *Six Day War* yang melibatkan Arab-Israel dimana salah satunya adalah permasalahan pasokan sumber air ke masing-masing negara belum mampu membawa dampak yang berarti terhadap ketegangan Arab-Israel. Telah diatur didalam Resolusi 242

dimana menjelaskan tentang berbagai pengaturan dalam hal seperti masalah pengungsi, pasokan air dan masalah keamanan melibatkan Arab-Israel. Berbagai pengaturan sebagai sarana perdamaian antara Arab-Israel yang diatur dalam Resolusi PBB Nomor 242 masih mengalami beberapa hambatan hingga pada akhirnya belum dapat juga mewujudkan perdamaian diantara kedua belah pihak. Berbagai pengaturan dan resolusi perdamaian yang belum dapat mewujudkan kesepakatan bersama dan konflik masih terus berlangsung, hal ini membawa *EcoPeace Middle East* hadir sebagai hal baru. *EcoPeace Middle East* hadir sebagai pilihan lain dimana pengaturan nasional dan resolusi konflik dianggap belum cukup mampu meminimalisir konflik antara Arab-Israel khususnya permasalahan pasokan air ke masing-masing Negara.

3.3.1 *EcoPeace Middle East* Sebagai Organisasi Perdamaian

EcoPeace Middle East memiliki nama awal yakni *Friends of EcoPeace Middle East* (FoEME) yang kemudian sekarang dikenal dengan nama *EcoPeace Middle East*. Melalui sebuah pertemuan bersejarah diadakan di Taba, Mesir, *EcoPeace Middle East* didirikan pada tanggal 7 Desember 1994 dimana *EcoPeace Middle East* hadir sebagai organisasi non-profit. Dalam hal ini, *EcoPeace Middle East* mendukung seruan Palestina untuk pengakuan PBB atas negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya, hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel. Hal ini sesuai dengan posisi lama *EcoPeace Middle East* ini mendukung solusi dua-negara (*two-state*) dalam semangat Inisiatif Perdamaian Arab (*Arab Peace Initiative*), termasuk dalam

pengakuan hak Israel dan Palestina untuk dua negara terpisah berdasarkan perbatasan tahun 1967.

EcoPeace Middle East merupakan organisasi lingkungan non-pemerintahan dari Timur Tengah yang memiliki tujuan umum memajukan pembangunan berkelanjutan dan perdamaian untuk menyatukan lingkungan antara Yordania, Palestina, dan Israel. Tujuan utama dari *EcoPeace Middle East* adalah untuk mempromosikan usaha kerjasama antar negara kawasan daerah aliran Sungai Yordan dalam melindungi warisan lingkungan untuk kepentingan bersama.

EcoPeace Middle East dibentuk melalui *General Assembly*, dimana Dewan Pengawas terdiri dari 2(dua) anggota dari masing-masing entitas dan memiliki 4(empat) anggota Sekretariat terpilih dimana bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. *EcoPeace Middle East* berusaha menggabungkan tokoh dari beberapa negara yang terlibat konflik dalam sistem kerjanya. Hal ini terbukti dengan bentuk kesekretariatan dari *EcoPeace Middle East* terdiri dari Ketua(*Chairperson*) yakni Dr. Magdi Allam berasal dari Mesir; Sekretaris Umum(*Secretary General*) Mr. Gidon Bromberg dari Israel; *International Officer* berasal dari Yordania yakni Mr. Adnan Budieri dan *Technical Coordinator*, Dr. Adnan Enshassi dari Palestina. Kantor *EcoPeace Middle East* sendiri tersebar di beberapa daerah yakni di Amman, Bethlehem dan Tel-Aviv.

Konsep perdamaian lingkungan mengacu pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan: pembangunan ekonomi, sosial budaya dan ekologis (FoEME, 2014). Pembangunan kerjasama lingkungan mengintegrasikan pada proses pembangunan ekonomi dan sosial-budaya. Didalamnya sendiri, masyarakat dapat saling menguntungkan satu sama lain melalui manajemen umum sumber daya bersama. Selanjutnya, kerja sama antara masyarakat menawarkan *platform* untuk berlangsungnya dialog antar budaya. Hal tersebut yang kemudian memungkinkan proses saling membangun kepercayaan dan mendorong pembentukan damai hubungan sosial diantara masyarakat. Dalam pembangunan ekologi, *EcoPeace Middle East* mengupayakan perbaikan ekosistem yang kompleks dengan membuat proyek-proyek pembangunan daerah aliran sungai.

3.3.2 Mekanisme Kerja *EcoPeace Middle East*

Terbentuknya *EcoPeace Middle East* sebagai hasil dari proses perdamaian dimana menandai realisasi dampak lingkungan di Timur Tengah yang telah melampaui batas termasuk isu lingkungan yang mulai masuk ke isu politik, ekonomi, dan sosial sehingga harus ditangani dari perspektif regional. *EcoPeace Middle East* meandang bahwasanya Sungai Yordan merupakan sumber utama air tawar di daerah yang termasuk langka akan air, dimana *EcoPeace Middle East* menentang batas-batas politik yang mencakup bagian dari Israel, Yordania, Tepi Barat yang diwakili Palestina.

EcoPeace Middle East sebagai organisasi unik non-pemerintahan hadir untuk menyatukan Yordania, Palestina, dan Israel. Tujuan utama *EcoPeace Middle East* adalah mempromosikan perlindungan lingkungan untuk kepentingan

bersama. Dengan demikian, *EcoPeace Middle East* berusaha untuk memajukan kedua pembangunan daerah yang berkelanjutan dan penciptaan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian di wilayah Sungai Yordan kawasan Timur Tengah. Dalam praktek kerjanya *EcoPeace Middle East* sebagai organisasi non-pemerintahan ingin memajukan pembangunan berkelanjutan dan perdamaian di wilayah Daerah Aliran Sungai Yordan. Proyek-proyek *EcoPeace Middle East* dapat dikategorikan sesuai dengan tema-tema berikut: (FoEME, 2014)

- i. *Geographical context - the Dead Sea Rift Valley runs from the Gulf of Aqaba / Eilat, in the south, along the Arava Valley, through the Dead Sea, up the Jordan River into the Sea of Galilee and beyond, connecting the peoples of the Eastern Mediterranean. Many of our projects are located along this shared, complex ecosystem.*
- ii. *Socio-Economic based projects focus on issues such as sustainable water use, water privatization, trade, sustainable development, water as a human security issue, developing renewable energy and healthy food practices.*
- iii. *Climate change stands on its own, as being one of the greatest environmental, social and economic threats facing the planet today, especially to our scarce water resources.*

Dalam konteks geografis *EcoPeace Middle East* mengupayakan perbaikan ekosistem yang kompleks dengan membuat proyek-proyek pembangunan daerah aliran sungai sepanjang Laut Galilea hingga ke Laut Mati. Di Laut Mati sendiri merupakan pertemuan air dari utara yakni Sungai Yordan dan sumber air dari selatan yakni Laut Merah(*Red Sea*) setelah mengalami proses *desalinitation*, yakni proses merubah air garam yang berasal dari laut menjadi air tawar. *EcoPeace Middle East* membangun berbagai proyek ekosistem kompleks sepanjang aliran Sungai Yordan dimana melibatkan berbagai masyarakat timur mideterania.

Selanjutnya, dalam konteks Sosial Ekonomi proyek *EcoPeace Middle East* berfokus pada isu-isu seperti penggunaan berkelanjutan terhadap sumber air, privatisasi air, perdagangan, pembangunan berkelanjutan, menjadikan air sebagai isu keamanan bagi setiap manusia, mengembangkan energi terbaru dan praktek makanan sehat. Yang terakhir, *EcoPeace Middle East* menanggapi atas perubahan iklim. *EcoPeace Middle East* menganggap bahwa perubahan iklim sebagai salah satu ancaman lingkungan, sosial dan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh dunia, terutama untuk sumber daya yang mulai langka yakni air.

EcoPeace Middle East melalui proyek-proyek damai dan penyelamatan lingkungan bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai kelompok masyarakat resmi dan sipil yang melalui proyek-proyek yang dikembangkan tersebut dapat memiliki dampak pada perlindungan lingkungan dan pembangunan perdamaian kawasan Timur Tengah. Penciptaan perdamaian lingkungan didasarkan pada prinsip bahwa ketergantungan manusia pada sumber daya alam dan lingkungan yang sehat memfasilitasi kerjasama antara masyarakat dan bangsa dan karena itu dapat mendorong proses perdamaian di daerah konflik.

Dari pemaparan diatas yang kemudian menunjukkan bahwasanya dalam meminimalisir konflik Arab-Israel dalam hal alokasi sumber air, *EcoPeace Middle East* sebagai organisasi non pemerintah bekerja melalui dua cara yakni melalui *Top Down* seperti *research, lobby dan advocacy* dan *Bottom Up* seperti terbentuknya komunitas untuk membangun proyek kerjasama perbaikan lingkungan. Melalui cara kerja tersebut yang kemudian menjadi alat sebagai suatu proses perwujudan perdamaian di Timur Tengah khususnya masalah alokasi air

Sungai Yordan yang melibatkan Yordania, Israel dan Palestina. Sebagai organisasi non pemerintahan, *EcoPeace Middle East* menawarkan upaya baru dalam perdamaian di Timur Tengah karena pengaturan internasional dianggap belum mampu mewujudkan perdamaian.